

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UMP TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH PRA DAN PASCA DESENTRALISASI FISKAL

Nenik Woyanti

Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP

Jalan Prof Sudarto Tembalang Semarang

nenywoyanti@yahoo.co.id

Abstrak

Secara absolute selama tahun 2006 hingga 2010 jumlah penduduk miskin masih tinggi. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terkonsentrasinya pembangunan. Oleh karena itu sejak tahun 2011 pemerintah Indonesia menerapkan system desentralisasi fiskal. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil-hasil pembangunan diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Demikian juga dengan UMP riil. Namun UMP riil di Jawa Tengah masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMP terhadap pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah pra dan pasca desentralisasi fiskal. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan alat statistik Regresi Linier Berganda. Adapun teknik penaksiran model yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Data yang digunakan adalah data sekunder. Variabel bebas adalah pertumbuhan ekonomi, UMP dan penerapan Desentralisasi Fiskal, sedang variabel terikat adalah angka kemiskinan.

Model regresi yang menyertakan variabel-variabel pertumbuhan ekonomi, UMP dan pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal cukup baik dalam menjelaskan variasi angka kemiskinan. Secara simultan semua variable bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variable terikat. Demikian halnya secara parsial masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Saran yang diajukan adalah hendaknya pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih mengoptimalkan pembangunan sektoral yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki termasuk kekayaan sumber daya manusia yang beragam kualitasnya, lebih mengoptimalkan pembangunan di segala bidang dengan cara menggerakkan kegiatan sosial ekonomi dan meningkatkan mutu sumber daya manusia, serta memperkuat kelembagaan penduduk miskin, dan meningkatkan anggaran untuk kegiatan yang potensial mengatasi masalah kemiskinan, diantaranya adalah sector pertanian, pendidikan, kesehatan dan sarana pra sarana.

Kata Kunci : *Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Desentralisasi Fiskal, Kemiskinan*

Abstract

In absolute during 2006 to 2010 the number of poor people in Central Java is still high. One reason is because it is still concentrated development. Therefore, since in 2011 the Indonesian government to implement fiscal decentralization system. High economic growth with equity and development results is expected to lower the poverty rate. Similarly, the Provincial Minimum Wage. However, the real minimum wage in Central Java is still low. The purpose of this study was to analyze the influence of economic growth on poverty reduction Provincial Minimum Wage in Central Java before

and after fiscal decentralization. To answer these objectives used statistical tools Multiple Linear Regression. The technique assessment model used is Ordinary Least Square (OLS). Data used are secondary data. Independent variables are economic growth, Provincial Minimum Wage and implementation of Fiscal Decentralization. Dependent variable is the poverty.

Regression model that included the variables of economic growth, the Provincial Minimum Wage and enforcement of fiscal decentralization policy quite well in explaining the variation in poverty. Simultaneously all independent variables significantly influence dependent variable. Similarly partially independent of each variable significant effect on poverty in Central Java.

Suggestions put forward are the government should further optimize the province of Central Java-oriented sectoral development on improving the quality and quantity of production to take advantage of all its potential, including a wealth of diverse human resources quality, optimize the development in all fields by moving the socio-economic activities and improve the quality of human resources, and institutional strengthening of the poor, and increasing the budget for activities that potentially solve the problem of poverty, including the agricultural sector, education, health and infrastructure facilities pre.

Keywords : Economic Growth, Provincial Minimum Wage, Fiscal Decentralization, Poverty

Latar Belakang

Isu ekonomi makro yang dihadapi Pemerintah Indonesia sepanjang sejarah adalah masalah kemiskinan. Pada era sebelum tahun 1976, angka kemiskinan Indonesia bahkan mencapai 40 persen. Pada akhirnya selama 20 tahun mulai 1976 hingga 1996 angka kemiskinan Indonesia berhasil turun signifikan menjadi 11 persen. Namun demikian angka ini masih tergolong tinggi, bahkan hingga saat ini, dimana angka kemiskinan berkisar pada angka 10 persen. Periode empat belas tahun semenjak krisis multi dimensional melanda (1998) mestinya waktu yang cukup bagi pemerintah untuk mengentaskan penduduk dari lingkaran kemiskinan, namun nyatanya hingga tahun 2011 angka kemiskinan di Indonesia masih stagnan pada kisaran 10 persen (BPS, 2012). Lamanya waktu yang ditempuh oleh Pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, bahkan sekedar mengurangi 1 persen tingkat kemiskinan menjadi indikasi bahwa kemiskinan di Indonesia sudah pada tahap kronis.

Data terakhir tahun 2011 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen). Ini berarti jumlah penduduk miskin turun 1 juta orang, atau secara relative terjadi penurunan sebesar 0,84 persen. Sudah jelas, penurunan jumlah penduduk Indonesia pada Maret 2011 belum mencapai 1 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Dari 30,02 juta orang penduduk miskin di Indonesia tahun 2011 tersebut, paling banyak berada di Pulau Jawa, yakni mencapai 16.744.410 jiwa atau setara dengan 12,09 persen, sementara selebihnya tersebar di ratusan pulau lain. Dari 16.744.410 juta penduduk miskin di Pulau Jawa tersebut, 16,21 persen diantaranya bermukim di Provinsi Jawa Tengah (5,256 juta orang) pada September 2011. Dibandingkan dengan bulan Maret tahun berjalan, berarti angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan sebanyak 148,6 ribu orang dimana penduduk miskin pada bulan Maret 2011 berjumlah 5,107 juta orang (15,76 persen).

Tingginya angka kemiskinan antara lain disebabkan oleh kurang meratanya pembangunan perekonomian hingga ke daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pemerintah. Sebab pembangunan ekonomi yang bersifat sentralistik, yang sekalipun terpusat di Pulau Jawa, ternyata tidak cukup mampu

melepaskan Provinsi Jawa Tengah dari masalah kemiskinan. Siregar dan Wahyuniarti (2008) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu, artinya tidak merata bagi seluruh golongan masyarakat. Terkait dengan kurang efisiennya pengeluaran publik akibat pembangunan yang bersifat sentralistik, maka sejak tahun 2001 pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal, yang selain menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, juga fokus pada upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang tepatnya dimulai pada 1 Januari 2001 dan masih berjalan hingga sekarang, ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999, yang selanjutnya diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sistem desentralistik diterapkan dengan harapan setiap daerah mampu mengelola potensi daerah masing-masing secara maksimal hingga mencapai kesejahteraan rakyat yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun demikian peran positif otonomi daerah dan desentralisasi fiskal terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat masih perlu diteliti kembali mengingat penelitian yang dilakukan oleh Skira (2006) menghasilkan temuan yang kontradiktif, dimana sistem desentralistik justru menambah jumlah penduduk miskin.

Semangat dan jiwa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada esensinya adalah mengeliminir disparitas ekonomi regional, yang pada gilirannya memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Wongdesmiyati (2010) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan factor produksi pada suatu tahun lebih besar dibandingkan dengan pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang seringkali dijadikan tolok ukur kinerja perekonomian suatu wilayah, belum tentu berkorelasi positif dengan kesejahteraan rakyatnya. Setidaknya ini terbukti pada hasil penelitian Siregar (2008), Agrawal (2008), Wongdesmiwati (2010) yang menunjukkan adanya pengaruh negative pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

Rerata pertumbuhan PDRB selama kurun waktu 2006 hingga 2010 jauh lebih rendah (5,5 persen) dibandingkan dengan rerata pertumbuhan jumlah penduduk miskin (19,04 persen). Perbedaan angka yang cukup signifikan antara pertumbuhan penduduk miskin dengan pertumbuhan ekonomi ini menjadi indikator bahwa di Provinsi Jawa Tengah terdapat persoalan kemiskinan yang nyata. Selain pertumbuhan ekonomi, kebijakan upah minimum ditengarai juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan pengusaha untuk memberikan upah kepada karyawan dalam lingkungan usahanya, dimana besaran upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah). Maksud diterapkannya kebijakan penetapan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman terhadap pekerja agar tidak dieksploitasi dan mendapat upah sesuai dengan kebutuhan hidup minimum (KHM). Jika KHM dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkatkan dan terbebas dari masalah kemiskinan. Penelitian ini menggunakan peubah upah riil, sebab upah riil mampu menggambarkan daya beli dari pendapatan yang diterima pekerja. Besaran upah riil dihitung berdasarkan besarnya upah nominal yang dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

UMP riil Provinsi Jawa Tengah meningkat, dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,7 persen per tahun. Nilai UMP riil sempat turun pada tahun 2009. Penurunan ini merupakan dampak dari krisis global yang berawal dari Negara maju seperti AS dan Jepang. Imbas tidak langsung akibat kegiatan ekspor impor yang terganggu bagi perekonomian Indonesia pada tahun berjalan adalah pertumbuhan UMP riil yang turun drastis hingga mencapai level minus 4,7 persen. Besaran UMP riil memberikan pengaruh terhadap

jumlah penduduk miskin. Ini telah dibuktikan oleh Agrawal (2008) dan Skira (2006) melalui hasil temuan penelitiannya.

Perumusan Masalah

Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun 2006 hingga 2010 relatif baik karena terdapat arah kecenderungan menurun dari 22,19 persen pada tahun 2006 menjadi 16,11 persen pada tahun 2010, meskipun secara absolute jumlah penduduk miskin masih tinggi dengan rata-rata 6.332.600 jiwa (table 1). Rata-rata tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih tergolong tinggi dibanding dengan provinsi lain di Pulau Jawa, dan terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Timur (BPS, 2012). Salah satu penyebabnya adalah masih terkonsentrasi pembangunan dan belum meratanya hasil-hasilnya dari usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dengan hasil pembangunan perekonomian yang hasilnya belum dirasa menyejahterakan penduduk secara merata, maka sejak tahun 2011 pemerintah Indonesia menerapkan sistem desentralisasi fiskal, yang dimaksudkan agar setiap daerah mengelola potensi daerah masing-masing.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil pertumbuhan diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Ini berarti, untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah upah minimum riil. Besaran UMP riil mampu mencerminkan daya beli masyarakat secara nyata. Rerata UMP riil di Jawa Tengah tergolong masih rendah yakni Rp 330.000 per tahun dalam kurun waktu 2006 hingga 2010. Rendahnya UMP riil berdampak pada masih tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

Atas dasar permasalahan di atas maka persoalan penelitian yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMP riil terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah pra dan pasca desentralisasi fiskal.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.
- Menganalisis pengaruh UMP riil terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.
- Menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Kajian Pustaka

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensional yang ditandai dengan ketidakberdayaan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar standar atas tiga masalah kehidupan. Pertama, masalah kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Kedua, masalah kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Ketiga, masalah kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Definisi Kemiskinan

Kemiskinan dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni (Todaro, 2003):

1. Aspek kebutuhan hidup yang layak. Golongan ini mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah

tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok yang disebabkan adanya kekurangan barang dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan hidup standar yang layak. Ini merupakan kemiskinan absolut/ mutlak yakni tidak terpenuhinya standar kebutuhan dasar.

2. Aspek penghasilan. Di sini kemiskinan dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.
3. Aspek kesempatan atau opportunity, dimana kemiskinan terjadi karena ketidaksamaan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan sosial seperti ketrampilan yang memadai, informasi yang berguna, jaringan social, dan sumber modal.
4. Aspek keadaan atau kondisi. Kemiskinan dilihat sebagai suatu keadaan yang dicirikan dengan kondisi kurang makan dan gizi, kekurangan pakaian, perumahan tidak memadai, pendidikan yang rendah, dan sedikitnya kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan.
5. Aspek penguasaan terhadap sumber-sumber pendapatan. Artinya, kemiskinan merupakan keterlantaran yang disebabkan oleh ketidak-merataan distribusi pendapatan.

Pengukuran Kemiskinan

Kemiskinan dibedakan dalam dua kategori, yaitu (Tulus Tambunan 2001):

1. Kemiskinan Absolut.
Kemiskinan absolut mengacu pada satu ukuran standar yang berlaku sama, yang tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat atau Negara. Indikator dari pengukuran absolut adalah persentase dari penduduk yang makan di bawah jumlah yang dibutuhkan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). Indonesia menandai kemiskinan absolute dengan batasan jika jumlah uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kurang dari 2.100 kalori per kapita. Sementara itu, Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai kondisi hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1 per hari.
2. Kemiskinan Relatif.
Kemiskinan relative adalah suatu keadaan kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum dalam masyarakat tersebut, yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Orang yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin relative. BKKBN mendefinisikan miskin dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang didalamnya mengkategorikan keluarga sebagai Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I berdasarkan aspek materiil dan spirituil.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (Sadono Sukirno, 2006) adalah proses kenaikan pendapatan nasional dalam satu periode. Dalam perkembangannya, banyak ahli ekonomi yang merumuskan konsep pertumbuhan ekonomi, yang dibedakan melalui mazhabnya.

Teori pertumbuhan klasik dikembangkan oleh Adam Smith dan David Ricardo.

1. Adam Smith
Smith menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditandai oleh dua factor yang saling berkaitan yakni pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Artinya pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya penambahan penduduk. Dengan adanya penambahan penduduk maka akan terdapat penambahan output atau hasil. Tinggi rendahnya output dipengaruhi oleh 3 komponen, yakni sumber daya alam, tenaga kerja, dan jumlah modal.

Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.

2. David Ricardo

Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah turun. Rendahnya upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan stagnan. Teori David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political and Taxation* yang membahas:

- Nilai dan harga barang
- Distribusi pendapatan
- Perdagangan Internasional
- Akumulasi dan pertumbuhan ekonomi

3. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Robert M Solow

Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan ada apabila ada pertumbuhan output. Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dengan mengkombinasikan antara tenaga kerja (L), factor modal (C) dan teknologi modern. Output itu sendiri merupakan hasil dari 2 input, yaitu modal dan tenaga kerja, yang selanjutnya dapat ditulis dalam bentuk fungsi produksi agregat $Q=f(C,L)$. Disebutkan Solow, pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

4. Harrod-Domar

Teori Harrod dan Domar menggabungkan paham klasik yang mementingkan penawaran (produksi) dengan teori Keynes yang mementingkan permintaan (konsumsi). Harrod dan Domar beranggapan bahwa modal harus dipakai dengan sebaik-baiknya karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peran modal. Menurutnya penambahan modal akan meningkatkan kemajuan menghasilkan suatu barang dan menaikkan permintaan efektif. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja

5. Joseph A. Schumpeter

Schumpeter menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu Negara akan sangat bergantung pada jiwa kewirausahaan para pelaku ekonominya. Ini berarti pengusaha memiliki peran besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha merupakan golongan yang terus membuat inovasi (pembaharuan) dalam kegiatan ekonomi, yang meliputi: memperkenalkan barang baru, mempertinggi efisiensi, memperluas pasar, mengembangkan sumber-sumber bahan mentah, mengadakan perubahan dalam organisasi untuk mempertinggi efisiensinya

Teori Upah Minimum

Upah adalah semua jenis pembayaran atas jasa-jasa yang disediakan pekerja untuk perusahaan (Boediono, 2002). Upah dapat dibedakan menjadi upah nominal dan upah riil. Upah nominal yaitu jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan atau fisik pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah riil yaitu tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang dan jasa keperluan pekerja. Baik upah nominal maupun upah riil ada di dalam pasar kerja.

Pasar kerja adalah sarana pertemuan antara penjual dan pembeli tenaga kerja, dimana penjual tenaga kerja atau pencari kerja akan menerima upah setelah mencurahkan waktunya kepada pembeli tenaga kerja, sebaliknya pembeli tenaga kerja atau lembaga/ perusahaan akan mengeluarkan uang (upah) kepada tenaga kerja sebagai kompensasi atas usaha jasa yang telah diserahkan dalam proses produksi menghasilkan barang dan jasa. Jenis pasar kerja bisa mempengaruhi pola penentuan upah. Pasar kerja terbagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Pasar Persaingan Sempurna.

Pasar persaingan sempurna dicirikan oleh jumlah pencari kerja dan jumlah perusahaan yang sama banyak. Sama banyak di sini tidak mengacu kepada jumlah fisik, melainkan lebih kepada tingkat independensinya, sebab diantara tenaga kerja dan perusahaan tidak ada ketergantungan. Oleh sebab itu masing-masing pihak secara individual tidak memiliki kekuatan untuk menentukan tingkat upah. Dalam situasi ini upah ditentukan berdasarkan keseimbangan kekuatan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

2. Pasar Monopsoni;

Pasar monopsoni adalah pasar tenaga kerja yang terdiri dari banyak pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan, namun hanya terdapat satu perusahaan yang membutuhkan jasa pekerja. Pengertian satu perusahaan di sini bukan berarti secara fisik, tetapi memiliki arti sebagai perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam satu asosiasi perusahaan yang membuat perilaku seragam diantara anggotanya. Dengan demikian "pasar monopsoni" (yang disebutkan sebagai satu perusahaan tadi) memiliki kekuatan nyata dalam pasar untuk menentukan tingkat upah. Dalam situasi ini upah pekerja sering berada di bawah tingkat produktivitasnya atau dengan kata lain terjadi eksploitasi tenaga kerja. Penetapan upah minimum pada pasar monopsoni justru berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Atas dasar pemahaman ini, pasar tenaga kerja yang monopsonistik dianggap sebagai justifikasi teoretis bagi pemberlakuan upah minimum.

3. Pasar monopoli

Pasar monopoli adalah pasar tenaga kerja yang di dalamnya terdapat banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tetapi hanya ada 'satu pencari kerja' yang menginginkan pekerjaan. Di sini, umumnya tenaga kerja menyatukan diri dalam serikat pekerja, yakni organisasi yang didirikan dengan tujuan agar para pekerja dapat bersatu (menjadi satu kesatuan) dalam membicarakan hubungan kerja dan menuntut syarat-syarat kerja tertentu dengan pengusaha. Pengertian "satu pencari kerja" bukan berarti secara fisik yakni satu orang pekerja saja, namun satu serikat buruh/ pekerja yang sangat kuat sehingga mampu membentuk keseragaman perilaku tenaga kerja. Dengan demikian satu Serikat Buruh memiliki kekuatan untuk menentukan tingkat upah dalam pasar tenaga kerja. Dalam situasi ini upah pekerja adalah upah maksimum, dan apabila pada suatu kesempatan terjadi tuntutan kenaikan upah, maka sejatinya kenaikan upah justru akan mendorong terjadinya peningkatan pengangguran.

Kebijakan Upah Minimum Indonesia

Di Indonesia, dimana system perekonomian yang berlaku adalah campuran, penetapan upah tidak sepenuhnya diserahkan kepada pasar, namun masih perlu intervensi dari pemerintah guna melindungi kesejahteraan pekerja dalam menjaga keharmonisan hubungan antara pengusaha dan pekerja. Intervensi penetapan upah oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk dikeluarkannya Undang-undang upah minimum yang didalamnya berisi tentang penetapan harga terendah tenaga kerja yang

harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerjanya. Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin, melalui pemberian upah yang layak. Kebijakan pemerintah ini sejalan dengan konsep Kaufman (2000), yang menyatakan bahwa tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum pekerja seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja.

Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang upah minimum. Pengertian upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Sementara itu tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi kerja. Besaran upah minimum regional di Indonesia ditetapkan berdasarkan besarnya kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.

Upah minimum dapat dipecah berdasarkan region serta sektoral. Factor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penghitungan upah minimum adalah kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan perusahaan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 (4) tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa besaran upah minimum antara lain didasarkan pada tahap pencapaian KHL, pertumbuhan PDRB, produktivitas, dan mempertimbangkan keberadaan sektor marjinal (usaha yang paling tidak mampu).

Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan *desentralisasi fiskal* di Indonesia sudah dilakukan *sejak* 1 Januari 2001. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari kebijakan desentralisasi. Agar pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka pemerintah daerah harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/ Bantuan dari Pemerintah Pusat. Sesuai dengan UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan Pusat - Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan (*money follows function*). Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan. Selanjutnya dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal dengan Dana Perimbangan. Di samping itu daerah juga diberi kewenangan penuh untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas daerah, serta pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran penyediaan sarana dan prasarana daerah.

Penelitian Terdahulu

Beberapa studi terdahulu yang meneliti hubungan antara kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan desentralisasi fiskal diantaranya adalah:

1. Wongdesmiwati (2009) dalam penelitiannya yang berjudul *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia* yang menggunakan metode analisis regresi berganda dari tahun 1990 hingga tahun 2004 menemukan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak negatif terhadap jumlah penduduk miskin.
2. Wodon (1999) dalam hasil penelitiannya yang memakai data panel regional untuk kasus Bangladesh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi tingkat kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan.
3. Smeru (2001) menyebutkan bahwa dampak upah minimum terhadap tingkat kemiskinan pekerja di sektor modern adalah positif. Demikian juga dampak upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja di sektor informal sebab kenaikan upah minimum akan berpengaruh terhadap penghasilan riil dari pekerja di sektor informal, akibat kesempatan kerja yang semakin sempit dengan kehadiran pekerja baru hasil limpahan sektor modern.
4. Skira (2006) dalam penelitiannya yang mengkaji dampak diberlakukannya desentralisasi fiskal terhadap angka kemiskinan menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang positif di antara kedua faktor tersebut. Artinya dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal berdampak pada jumlah penduduk yang semakin meningkat. Hasil penelitian Skalira ini bertolak belakang dengan apa yang ditemui Dwi Musliani (2011) dalam penelitiannya yang mengamati dampak kebijakan Fiskal Daerah terhadap kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan simulasi kebijakan fiskal yang dilakukannya, diperoleh hasil bahwa seluruh simulasi kebijakan fiskal daerah memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin meski dengan besaran yang berbeda-beda.

Metodologi

Wilayah penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kedua di Pulau Jawa namun dengan laju pertumbuhan penduduk miskin yang terus menurun sejak tahun 2006 hingga 2010. Penelitian ini memerlukan data sekunder yang dikumpulkan dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan instansi terkait lainnya, seperti Bappermas, Pemda, dan Bappeda. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain meliputi: PDB, laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan UMP Jawa Tengah selama 21 tahun mulai tahun 1990 hingga 2010.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu upaya untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisis isi buku-buku literature dan data-data olahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dan akurat.

Metode Analisis.

Tujuan pertama penelitian ini adalah menganalisis pengaruh faktor ekonomi, UMP, dan desentralisasi fiskal terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah pra dan Pasca penerapan desentralisasi fiskal. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan alat statistik Regresi Linier Berganda, sedangkan fungsi yang membentuk analisis 'pengaruh' tersebut adalah :

$$\text{Miskin} = f(\text{PDRB}, \text{UMP}, \text{D})$$

Adapun teknik penaksiran model yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS) dari analisis regresi sebagaimana yang digunakan oleh Wongdesmiwati (2010) yakni:

$$\text{Miskin} = a + b_1 \text{PDRB} + b_2 \text{UMP} + b_3 \text{D}$$

Dimana ;

Miskin = Angka Kemiskinan (jiwa)

PDRB = Pertumbuhan ekonomi (Rp)

UMP = UMP (Rp per bulan)

D = Desentralisasi fiskal

D = 1 jika pasca penerapan desentralisasi fiskal

D = 0 jika sebaliknya

Definisi Operasional

1. Kemiskinan (Miskin)

Kemiskinan dalam penelitian ini diukur dengan besarnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah selama tahun 1990-2010.

2. Pertumbuhan ekonomi (PDRB)

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan 2000 selama tahun 1990-2010. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah persen.

3. UMP

Dalam penelitian ini UMP yang digunakan adalah UMP riil, yaitu UMP yang menggambarkan daya beli dari pendapatan / upah yang diterima pekerja/ buruh. Upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Satuan dari variabel UMP adalah Rupiah per bulan.

4. Desentralisasi Fiskal (D)

Untuk mengukur derajat desentralisasi pada penelitian ini digunakan variable Dummy, yakni D = 1 jika pasca desentralisasi fiskal, D = 0 jika sebaliknya

Hipotesis Penelitian

- Pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.
- UMP diduga berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.
- Desentralisasi Fiskal diduga berpengaruh positif terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Hasil dan Pembahasan

Regresi terhadap model IPM menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)*. Hasil estimasi terhadap model yang digunakan diperoleh nilai koefisien tiap variable sebagaimana dalam lampiran dan disajikan sebagai berikut :

Variabel Konstanta	Koefisien 8251908,681	t-statistik 16.917	Probabilitas 0,000	Keterangan Signifikan
PDRB	-123608,482	-3.045	0.007	Signifikan
UMP	5174,269	3.477	0.003	Signifikan
D	1070200,867	2.635	0.017	Signifikan
n			21	
R ²			0,618	
F- statistik			9,178	
Probabilitas (F-stat)			0,001	

Sumber: *Data Mentah Diolah, 2012*

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan yang terbentuk adalah:

$$\text{Kemiskinan} = 8251908,681 - 123608,482 \text{ PDRB} + 5174,269 \text{ UMP} + 1070200,867 \text{ D} + \mu$$

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil regresi data sekunder untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMP dan pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal di Jawa Tengah pada tahun 1990 hingga 2010 diperoleh nilai koefisien determinan atau R² sebesar 0,618. Hal ini berarti 62 persen variasi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas yang terdiri dari variabel pertumbuhan ekonomi, UMP dan pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal. Sisanya sebesar 38 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa model regresi yang menyertakan variabel-variabel pertumbuhan ekonomi, UMP dan pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal telah cukup baik dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan.

Uji Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95 persen ($\alpha = 5\%$) semua variabel bebas, yakni pertumbuhan ekonomi, UMP dan Desentralisasi Fiskal terbukti memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah. Secara terperinci variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan pada taraf keyakinan 95 persen, variabel UMP berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemiskinan pada taraf keyakinan 95 persen, sedangkan variabel dummy yakni variabel desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan pada variabel kemiskinan pada taraf keyakinan 10 persen ($\alpha = 10\%$).

Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Hasil regresi diperoleh nilai F hitung sebesar 9,178 dengan probabilitas sebesar 0,000 dan jika dibandingkan dengan $\alpha = 5$ persen nilai probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari α yang ditetapkan yang sebesar 5 persen ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian kita dapat menolak Ho dan mengambil kesimpulan bahwa secara bersama-sama variabel pertumbuhan ekonomi, UMP dan Desentralisasi Fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Interpretasi dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMP dan Desentralisasi Fiskal terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah 1990 hingga 2010 adalah sebagai berikut:

1) *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Terhadap Angka Kemiskinan*

Dari hasil regresi, diperoleh hasil bahwa koefisien dari pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar -123608,482 dan signifikan secara statistic. Ini berarti kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan penurunan angka kemiskinan sebesar -123.608 jiwa di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu bangsa atau daerah dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan angka kemiskinan. Sementara syarat kecukupannya adalah pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Artinya, pertumbuhan ekonomi hendaknya menyebar di berbagai golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi sebagai syarat keharusan dan syarat kecukupan mempunyai pengertian bahwa secara langsung pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di berbagai sector dimana penduduk miskin bekerja yaitu baik di sektor formal maupun di sector informal. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang didapatkan dari sektor formal.

Koefisien hasil penelitian yang bertanda negative memberikan arti bahwa pertumbuhan ekonomi telah menyebar di setiap golongan pendapatan termasuk masyarakat golongan ekonomi rendah sehingga efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Wongdesmiwati (2009) yang menemukan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Ravallion dan Chen (1997) yang membuktikan adanya hubungan negatif (*trade-off*) yang kuat antara laju pertumbuhan pendapatan dan tingkat kemiskinan. Ravallion dan Chen (1997) menggunakan data dari survei pendapatan/ pengeluaran konsumsi rumah tangga di 67 NSB dan Negara-negara transisi untuk periode 1981-1994. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan hampir selalu bersamaan dengan peningkatan standar kehidupan, dan sebaliknya kemiskinan bertambah seiring dengan kontraksi ekonomi. Studi yang lain yang menghasilkan temuan yang sama adalah yang dilakukan Wodon (1999) dengan memakai data panel regional untuk kasus Negara Bangladesh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi tingkat kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Oleh karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan yang sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian ini berarti dapat diterima.

Di Indonesia sejak tahun 1990-an, diperkenalkan konsep pertumbuhan yang pro kemiskinan, yang selanjutnya disebut dengan *Pro-poor Growth*. Konsep ini ini menjadi terkenal saat banyak ekonom mulai menganalisis paket-paket kebijakan yang berhasil menurunkan kemiskinan dengan lebih cepat lewat pertumbuhan ekonomi dan perubahan distribusi pendapatan. *Pro-poor Growth* secara umum didefinisikan sebagai suatu proses pertumbuhan ekonomi yang membuat penurunan kemiskinan yang signifikan. Dalam usaha memberikan relevansi analisis dan operasional terhadap konsep tersebut, kemudian dilahirkan dua pendekatan. Pendekatan pertama dilandasi oleh keyakinan bahwa orang miskin pasti mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi walaupun tidak proporsional. Artinya, pertumbuhan ekonomi memihak orang miskin jika dibarengi dengan suatu pengurangan kesenjangan. Dengan perkataan lain, proporsi pendapatan dari kelompok miskin akan meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini disebut juga definisi relative dari *Pro-poor Growth* (World Bank, 2005).

Pendekatan kedua lebih fokus pada percepatan laju pertumbuhan pendapatan kelompok miskin melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan dengan memperbesar kesempatan berusaha bagi orang miskin untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan, yang hasilnya memperbesar laju penurunan kemiskinan. Banyak dari hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah penggerak utama laju *Pro-poor Growth*, tetapi perubahan-perubahan dalam kesenjangan bisa memperbesar atau mengurangi laju tersebut. Jadi, mempercepat laju *Pro-poor Growth* tidak saja mengejar pertumbuhan yang lebih pesat, tetapi juga upaya-upaya untuk memperbesar kemampuan orang-orang miskin untuk mendapatkan keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi. Dengan penekanan pada percepatan laju pengurangan kemiskinan, pendekatan ini konsisten dengan komitmen masyarakat dunia terhadap tujuan pertama dari *Mellinium Development Goals* (MDG), yakni pengurangan setengah dari proporsi dari masyarakat di sunia yang hidup kurang dari 1 dolar AS per hari antara tahun 1990 dan tahun 2015.

Pengaruh hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni efek *trickle-down* dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah/ pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa ada mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi *trickle-down* dari keuntungan dari pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.

2) *Pengaruh UMP Terhadap Angka Kemiskinan*

Dari hasil regresi ditemukan bahwa UMP memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan koefisien sebesar 5174,269. Hal ini berarti kenaikan UMP sebesar Rp 100.000 per bulan akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan, yakni angka kemiskinan akan meningkat sebesar 5.174 jiwa. Semakin tinggi UMP yang ditetapkan akan mendorong peningkatan angka kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP berpengaruh positif terhadap angka kemiskinan yang berarti sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, oleh karenanya hipotesis penelitian dapat diterima.

Kebijakan penetapan UMP memang menguntungkan pekerja, namun itu hanya berlaku untuk sebagian pekerja saja yang tenaganya terus digunakan oleh perusahaan. Para pekerja yang dapat mempertahankan pekerjaannya di pabrik akan mendapat keuntungan dari peningkatan UMP. Upah mereka meningkat, sehingga daya beli juga meningkat, pada gilirannya akan meningkat kesejahteraan dan mengentaskan mereka dari kemiskinan. Namun, sebagian pekerja yang lain justru akan mendapatkan kerugian yakni dengan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pekerja yang 'dirumahkan' akibat naiknya upah minimum adalah pihak yang dirugikan oleh kebijakan penetapan upah minimum tersebut. Sebab dengan upah yang semakin besar, berarti semakin besar pula beban pengusaha, yang apabila pengusaha tidak sanggup membayarnya, maka yang akan terjadi adalah diberlakukan PHK bagi pekerja yang rentan. Pekerja yang rentan kehilangan pekerjaan akibat kenaikan upah biasanya perempuan, muda usia, dan berpendidikan rendah. Pekerja golongan ini justru akan jatuh pada kondisi miskin seiring dengan meningkatnya UMP.

Dalam iklim pertumbuhan ekonomi tinggi, peningkatan UMP biasanya tidak lagi menjadi fokus dalam proses pembangunan karena pertumbuhan itu sendiri secara otomatis akan mendorong peningkatan upah, sehingga tingkat upah yang berlaku sama dengan atau di atas upah minimum (Smeru, 2001). Namun, dalam iklim pertumbuhan ekonomi rendah seperti di Indonesia, kenaikan tinggi pada UMP kemungkinan besar akan mempunyai efek merugikan bagi para pekerja, khususnya mereka yang

kurang *qualified* sehingga rentan terhadap perubahan harga tenaga kerja. Kebijakan UMP yang dilaksanakan dengan ketat, yang mendorong tingkat upah jauh di atas produktivitas kelompok rentan, tentu akan membawa efek yang merugikan bagi kelompok rentan ini.

Sebaliknya kebijakan UMP yang dilaksanakan dengan ketat akan membantu para pekerja yang lebih produktif yang dapat mempertahankan pekerjaannya di sektor modern. Namun kecil kemungkinannya bahwa para pekerja ini berada dalam kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berbagai hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok miskin adalah mereka yang bekerja di sektor informal perkotaan dan di perdesaan. Bila kebijakan UMP mengurangi tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor modern hingga di bawah pertumbuhan jumlah angkatan kerja, maka pekerja yang tidak mempunyai keterampilan bias saja akan terpaksa memasuki pekerjaan-pekerjaan yang lebih rendah tingkatnya, yakni di sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa dampak UMP terhadap tingkat kemiskinan pekerja di sektor modern adalah positif. Demikian juga, dampak upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja di sektor informal, yang merupakan sebagian besar dari angkatan kerja di Indonesia, juga positif, mengingat kenaikan UMP akan berpengaruh terhadap penghasilan dari mereka yang bekerja di sektor informal, akibat kesempatan kerja yang semakin sempit dengan kehadiran pekerja baru hasil limpahan sector modern.

3) *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dengan Tingkat Kemiskinan*

Tanda variabel Desentralisasi Fiskal yang di dalam model berbentuk dummy berfungsi menunjukkan perbedaan pengaruh antara pra dan pasca penerapan Kebijakan Fiskal terhadap angka kemiskinan. Tanda negative memberikan pengaruh yang lebih rendah, dan tanda positif memberikan pengaruh lebih tinggi. Dari hasil regresi nampak bahwa tanda pada variabel Desentralisasi Fiskal adalah positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan koefisien sebesar 1.070.200,867. Karena variabel Desentralisasi Fiskal adalah signifikan, maka ini mengandung makna bahwa secara statistic terdapat perbedaan nyata angka kemiskinan antara pra dan pasca desentralisasi fiskal. Perbedaannya adalah 1.070.200 jiwa.

Tanda positif pada koefisien dummy di sini berarti bahwa kebijakan Desentralisasi Fiskal memberikan dampak pada perekonomian berupa angka kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan saat kebijakan tersebut belum diterapkan, yakni dengan kelebihan sebesar 1.070.200 jiwa. Dengan demikian angka kemiskinan pasca penerapan kebijakan fiskal adalah sebesar 9.322.100 jiwa. Sementara saat sebelum diberlakukan kebijakan Desentralisasi Fiskal angka kemiskinan di Jawa Tengah rata-rata sebesar 8.251.908 jiwa, yakni setara dengan konstanta yang terdapat dalam model. Oleh karena hasil penelitian menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan yang sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian ini berarti dapat diterima.

Temuan penelitian ini di sesuai dengan hasil penelitian Skira (2006). Skira (2006) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kebijakan Desentralisasi Fiskal dengan angka kemiskinan. Dengan desentralisasi fiskal diharapkan tiap-tiap daerah mampu mengoptimalkan potensi wilayahnya, yang pada akhirnya mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan derajat kesejahteraan penduduk. Namun pada banyak negara berkembang termasuk Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut belum optimal terjadi, sebab kebijakan-kebijakan turunannya kurang bersifat responsif terhadap kebutuhan penduduk miskin.

Kesimpulan

Hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMP dan pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal di Jawa Tengah pada tahun 1990 hingga 2010 diperoleh nilai koefisien determinan yang cukup tinggi, yakni 0,618. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa model regresi yang menyertakan variabel-variabel pertumbuhan ekonomi, UMP dan pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal cukup baik dalam menjelaskan variasi angka kemiskinan.

Berdasar uji F-statistik, secara simultan semua variable bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variable terikat. Demikian halnya dengan uji T-statistik, masing-masing variable bebas yakni variable pertumbuhan ekonomi, UMP dan desentralisasi fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Saran:

- Hendaknya pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih mengoptimalkan pembangunan sektoral yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki termasuk kekayaan sumber daya manusia yang beragam kualitasnya sehingga dapat mendorong peningkatan PDRB yang pada akhirnya dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi diiringi dengan menurunnya angka kemiskinan.
- Hendaknya pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih mengoptimalkan pembangunan di segala bidang dengan cara menggerakkan kegiatan sosial ekonomi dan meningkatkan mutu sumber daya manusia, serta memperkuat kelembagaan penduduk miskin demi terwujudnya pemerataan pendapatan serta pemerataan hasil-hasil ekonomi keseluruhan golongan masyarakat.
- Guna mengurangi angka kemiskinan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah hendaknya meningkatkan anggaran untuk pos-pos yang potensial mengatasi masalah kemiskinan, diantaranya adalah sector pertanian, pendidikan, kesehatan dan sarana pra sarana. Sektor pertanian hingga saat ini merupakan sector utama yang bersinggungan langsung dengan kaum miskin. Adapaun sector pendidikan, kesehatan dan sarana pra sarana merupakan sector strategis setiap warga Negara untuk meningkatkan kualitas hidupnya namun merupakan sector yang sulit dinikmati oleh kaum miskin. Dengan meningkatkan anggaran pada pos-pos potensial ini diharapkan angka kemiskinan dapat berkurang.

Daftar Pustaka

- Agrawal, Pradeep, 2005, *Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence From Kazakhstan*, Asian Development Reviews, Vo. 34, No. 2, page 90-115 Available: <http://www.adb.org>
- Boediono, 2002: *Ekonomi Mikro : Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1*, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta.
- Dwi Musliani, 2011: *Dampak Kebijakan Fiskal Daerah Terhadap Kemiskinan di Indonesia*, ITB, Bogor, repository.ipb.ac.id/bitstream/.../2011dmu.pdf?...1
- Gujarati, Damodar, N, 2003, *Basic Econometrics Fourth Edition*, The McGraw Hill Companies Inc, New York

Kaufman, Bruce, 2000: *The Economics of Labor Markets*, Fifth Edition, The Dryden Press, New York.

Mankiw, N, Gregory (2006), *Teori Makro Ekonomi*, Edisi Kelima (terjemahan), Erlangga, Jakarta

Ravallion, Martin, 1995. *Growth and Poverty: Evidence for Developing Countries in the 1980s*, *Economics Letters* 48: 411-417.

Sadono Sukirno, 2006: Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan, cetakan ketiga, Kencana, Jakarta

Siregar, Harminto dan Dwi Wahyuniarti, 2008, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*, Available: <http://www.aysps.gbu.edu>

Skira, Meghan, 2006: *Fiskal Decentralization and Poverty*. Available: <http://www.aysps.gbu.edu>.

Smeru, 2001: Dampak Kebijakan Upah Minimum, www.smeru.or.id/report/.../minimum_wage/minimum_wageexumind.p.

Tulus Tambunan T.H, 1996: Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta

Todaro, Michael, 2003: *Pembangunan Ekonomi di Dunia*, Ketiga Edisi Keenam (terjemahan), Erlangga, Jakarta,

Wodon, Quentin T., 1999. *Growth, Poverty, and Inequality: A Regional Panel for Bangladesh*, The World Bank, Policy Research Working Paper #2070, March.

Wongdesmiwati, 2010, *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, *Analisa Ekonometrika*, available: <http://www.wordpress.com>